



Pendorong Gerobak Malioboro Minta Kejelasan

Saat ini, ada 29 pendorong gerobak yang masih bertahan di PPGM.

■ SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — Pendorong gerobak di Malioboro meminta kejelasan nasib setelah adanya relokasi pedagang kaki lima (PKL) sejak awal Februari 2022 lalu. Peralpnya, hingga saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah untuk mempekerjakan pendorong gerobak setelah kehilangan pekerjaan akibat dampak dari relokasi.

"Teman-teman juga bingung menghadapi Ramadhan ini, mau berbuka dengan apa, mau sahur dengan apa," kata Ketua Paguyuban Pendorong Gerobak Malioboro (PPGM), Kwat Suparjono usai audiensi di DPRD Kota Yogyakarta, Kamis (24/3).

Kwat menyebut, pihaknya meminta agar pemerintah memberikan lapak bagi pendorong gerobak. Saat ini, ada 29 pendorong gerobak yang masih bertahan di PPGM.

Sementara, yang lainnya sudah

banyak yang pulang kampung karena sudah tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Padahal, kata Kwat, total pendorong gerobak di Malioboro sebelumnya mencapai 91 pendorong.

"Total dari 33 (pendorong), terus mundur empat dan jadinya 29 (pendorong). Mundur karena *saking* lamanya nunggu keputusan (pemerintah), akhirnya pulang ke desa untuk membajak rumput dan bekerja di sawah, awalnya malah ada 91 (pendorong)," ujar Kwat.

Terkait dengan permintaan untuk mendapatkan lapak tersebut, pihaknya meminta setidaknya pemerintah memberikan lapak yang masih tersedia baik di Teras Malioboro 1 maupun di teras Malioboro 2 untuk pendorong gerobak yang terdampak.

Lapak ini, katanya, tidak harus diberikan sama dengan jumlah anggota PPGM yang ada. Namun, dari lapak yang diberikan nantinya dapat

akan dikelola bersama-sama oleh anggota di bawah paguyuban.

Pihaknya juga tidak mempermasalahkan jika lapak yang diberikan di Teras Malioboro 1 maupun Teras Malioboro 2. Pengembangan Teras Malioboro 1 juga diperkirakan baru akan selesai pada 2024 mendatang.

"Tidak mungkin kita meminta berapa lapak, kan maksanya jadinya, yang penting kita diperhatikan. Kalau 29 (pendorong yang aktif di paguyuban), bisa ditafsirkan 10 lapak atau berapa. Tidak semua harus dapat lapak, kalau kita nunggu pelebaran Teras Malioboro 1 *kan* tidak mungkin, dua tahun lebih lagi," kata Kwat.

Pihaknya juga tengah mengurus proposal untuk membentuk koperasi. Koperasi ini nantinya diharapkan dapat menjadi wadah dalam membantu pendorong gerobak yang terdampak relokasi untuk memulai usaha.

"Seberapa pun kita dapat lapak akan kita kelola di koperasi paguyuban pendorong gerobak. Kita sudah siap dengan nama dan apa yang akan kita kerjakan, tinggal kita menunggu proposal. Nanti ada yang menerima (proposal), tinggal tung-

gu turun (dana). Nanti kita bagi ke sektor-sektor seperti sembako, untuk ternak lele, ternak kambing dan sebagainya," jelasnya.

Meskipun begitu, untuk mengurus pembentukan koperasi tersebut tidak membutuhkan waktu yang sebentar. Setidaknya, kata Kwat, diperkirakan baru dua bulan ke depan akta dari koperasi baru turun.

"Selagi kita menunggu hasil atau turunnya akta koperasi itu, kita harus menghidupi anak istri. Mungkin ada bantuan dari pemerintah, karena selama ini kita belum mendapat bantuan apa pun," katanya.

Ketua pansus yang mengurus permasalahan relokasi PKL Malioboro yang dibentuk oleh DPRD Kota Yogyakarta, Foki Ardiyanto mengatakan, pendorong gerobak ini diupayakan untuk mendapat lapak setidaknya di Teras Malioboro 1.

"Teras Malioboro 1 *kan* luas sekali, kalau saya bayangkan ketika jalan-jalan ke situ, kawan-kawan (pendorong gerobak) masih bisa masuk di situ. Banyak ruang yang masih bisa dimanfaatkan," kata anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta tersebut. ■ ed: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005